

Identifikasi Potensi Investasi Wilayah Perbatasan Indonesia

Muhammad Izzudin, Aris Marfai, Andri Kurniawan, Agung S. Nugroho, Isnaini Sadali

Received: 22 04 2022 / Accepted: 10 11 2022 / Published: 01 12 2022

Abstract Indonesia's border regions are identical to areas that have not prospered. This condition is attractive to discuss the potential that can be developed in Indonesia's border regions to find a solution to accelerated development. The three objectives that are the focus of this research are identifying regional typologies based on geographic areas, identifying commodities that are potential investments in Indonesia's border areas based on border area typologies, and mapping the distribution of investment potential in Indonesia's border areas using Geographic Information System (GIS). This study used a literature study with descriptive analysis of secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) in 41 districts prioritized by the National Agency for Border Management (BNPP). Research explains that the primary sectors, such as agriculture, plantation and forestry, and natural resources, still dominated investment opportunities in the border region of Indonesia. This research implies that it will provide a reference for national and foreign investors and an agenda for the national government to plan the acceleration of development in Indonesia's most remote and isolated regions.

Keywords: Border Areas; Potential Investment; Regional Development.

Abstrak Wilayah perbatasan Indonesia identik dengan wilayah yang belum sejahtera. Kondisi ini menarik untuk dibahas potensi yang dapat dikembangkan di wilayah perbatasan Indonesia sehingga dapat dicari solusi percepatan pembangunan. Tiga tujuan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi tipologi wilayah berdasarkan wilayah geografi, (2) Mengidentifikasi komoditas yang menjadi potensi investasi di daerah perbatasan Indonesia berdasarkan tipologi wilayah perbatasan, (3) Memetakan sebaran potensi investasi daerah perbatasan Indonesia dengan menggunakan sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan analisis deskriptif data sekunder dari badan pusat statistik (BPS) di 41 kabupaten yang diprioritaskan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Hasil Penelitian menjelaskan bahwa sektor primer seperti sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan serta sumberdaya alam masih mendominasi peluang investasi di wilayah perbatasan Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah menjadi acuan bagi investor baik nasional maupun internasional dalam menanamkan investasi serta bagi pemerintah pusat, dapat menjadi agenda perencanaan percepatan pembangunan wilayah terluar dan terpencil Indonesia.

Kata kunci: Wilayah Perbatasan; Potensi Investasi; Pengembangan Wilayah

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



¹²Muhammad Izzudin, ²Aris Marfai, ²Andri Kurniawan,

²Agung S. Nugroho, ²Isnaini Sadali

¹Universitas Sriwijaya, Indonesia

²Universitas Gadjah Mada, Indonesia

muhammad.izzudin@mail.uqm.ac.id

1. Pendahuluan

Wilayah perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan

wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Syamwil & Oetomo, 2005; Budianta, 2010; Sudiar, 2017; Laili, 2018; Muta'ali dkk., 2018; Hidayati, 2020). Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional (Rani, 2012; Marwasta, 2016; Siregar et al., 2019; Suryana & Wijayanti, 2020).

Sedangkan pengembangan wilayah perbatasan pada tahun 2015 – 2019 adalah pengembangan kawasan perbatasan yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (Kusumartono et al., n.d.; Kurniadi, 2009; Panutan et al., 2019); dan 16 pengembangan PKSN lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya (Kurniadi, 2009; Purnamasari et al., 2016; Muta'ali et al., 2018), terutama 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) perbatasan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat berdaya saing dan aman (Nasution, 2018; Bakce et al.; Retnowati et al., 2019).

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang (Sholihah, 2016; Nasution, 2018) terutama: peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan dengan pendekatan pembangunan kawasan perbatasan yang terdiri dari: (i) pendekatan keamanan (*security approach*) (Ruyani, 2017; Bria dan Suharno, 2018; Sudiar, 2019); dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) (Munaf et al., 2008; Budianta, 2010; Mulyanto, 2017). Dari sisi penataan spasial nasional, kawasan perbatasan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia (Hasyim & Subagiyo, 2017; Muta'ali et al., 2018; Pusparini et al., 2020).

Kebijakan Pengembangan daerah Perbatasan sebagaimana telah ditentukan tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah percepatan yang terkoordinasi dan sinergis dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha, lembaga keuangan dan masyarakat pada umumnya terutama masyarakat di daerah perbatasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1)

Mengidentifikasi tipologi wilayah berdasarkan wilayah geografi, (2) Mengidentifikasi komoditas yang menjadi potensi investasi di daerah perbatasan Indonesia berdasarkan tipologi wilayah perbatasan, (3) Memetakan sebaran potensi investasi daerah perbatasan Indonesia dengan menggunakan sistem Informasi Geografis (SIG).

2. Metode

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini didasarkan pada pertimbangan ketetapan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang 41 Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam Kawasan Perbatasan pada pengelolaan tahun 2015-2019. Ketetapan tersebut tertuang pula didalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.



Gambar 1. Peta 41 Kabupaten Kota Perbatasan Indonesia menurut BNPP. (Sumber: Tim Penyusunan Buku *Investasi Perbatasan RI*, Fakultas Geografi UGM, 2019)

Adapun rincian nama Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam Kawasan Perbatasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam Kawasan Perbatasan Tahun 2015-2019.

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Aceh	Sabang	22	Nusa Tenggara Timur	Kupang
2	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	23	Nusa Tenggara Timur	TTU
3	Riau	Rokan Hilir	24	Nusa Tenggara Timur	Belu
4	Riau	Dumai Kota	25	Nusa Tenggara Timur	Malaka
5	Riau	Bengkalis	26	Nusa Tenggara Timur	Alor
6	Riau	Kepulauan Meranti	27	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
7	Riau	Pelalawan	28	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua
8	Riau	Indragiri Hilir	29	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
9	Kepulauan Riau	Karimun	30	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud
10	Kepulauan Riau	Kota Batam	31	Maluku	MBD
11	Kepulauan Riau	Bintan	32	Maluku	MTB
12	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	33	Maluku	Kepulauan Aru
13	Kepulauan Riau	Natuna	34	Maluku Utara	Morotai
14	Kalimantan Barat	Sambas	35	Papua	Supiori
15	Kalimantan Barat	Bengkayang	36	Papua	Keerom
16	Kalimantan Barat	Sanggau	37	Papua	Pegunungan Bintang
17	Kalimantan Barat	Sintang	38	Papua	Boven Digoel

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota
18	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	39	Papua	Merauke
19	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	40	Papua	Jayapura
20	Kalimantan Utara	Malinau	41	Papua Barat	Raja Ampat
21	Kalimantan Utara	Nunukan			

Sumber: BNPP (2019)

Studi yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan Analisis kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 41 kabupaten / kota yang menjadi kajian. Literatur dan referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa bentuk jurnal, buku, studi ilmiah dan hasil penelitian. Instrumen yang digunakan adalah dokumen jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis yang digunakan dalam studi deskriptif studi literatur dalam tiga cara: (1) inventarisasi literatur, (2) deskripsi literatur, dan (3) perbandingan literatur.

3. Hasil dan Pembahasan

Tipologi Wilayah Perbatasan

Berdasarkan interpretasi geografis / wilayahnya, kabupaten / kota

di perbatasan Indonesia terbagi atas 3 tipologi yaitu (1) daratan (*mainland*), (2) kepulauan (*archipelago*), dan (3) pesisir (*coastal*).

Tipologi wilayah perbatasan berbasis daratan (*mainland*) terdiri atas 12 kabupaten/ kota yang tersebar di 5 provinsi yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua (Tabel 1).

Tipologi wilayah perbatasan berbasis kepulauan (*archipelago*) terdiri atas 18 kabupaten/ kota yang tersebar di 9 provinsi yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (Tabel 1).

Tipologi wilayah perbatasan berbasis pesisir (*coastal*) terdiri atas 11 kabupaten/ kota yang tersebar di 5 provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Tabel 2).

Tabel 2. Tipologi Wilayah Perbatasan

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Tipologi
1	Riau	Pelalawan	Daratan (mainland)
2	Kalimantan Barat	Bengkayang	Daratan (mainland)
3	Kalimantan Barat	Sanggau	Daratan (mainland)
4	Kalimantan Barat	Sintang	Daratan (mainland)
5	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Daratan (mainland)
6	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	Daratan (mainland)
7	Kalimantan Utara	Malinau	Daratan (mainland)
8	Kalimantan Utara	Nunukan	Daratan (mainland)
9	Papua	Keerom	Daratan (mainland)
10	Papua	Pegunungan Bintang	Daratan (mainland)
11	Papua	Boven Digoel	Daratan (mainland)

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Tipologi
12	Papua	Merauke	Daratan (mainland)
13	Aceh	Sabang	Kepulauan (Archipelago)
14	Riau	Kepulauan Meranti	Kepulauan (Archipelago)
15	Kepulauan Riau	Karimun	Kepulauan (Archipelago)
16	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kepulauan (Archipelago)
17	Kepulauan Riau	Bintan	Kepulauan (Archipelago)
18	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Kepulauan (Archipelago)
19	Kepulauan Riau	Natuna	Kepulauan (Archipelago)
20	Nusa Tenggara Timur	Alor	Kepulauan (Archipelago)
21	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Kepulauan (Archipelago)
22	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Kepulauan (Archipelago)
23	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Kepulauan (Archipelago)
24	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	Kepulauan (Archipelago)
25	Maluku	Maluku Barat Daya	Kepulauan (Archipelago)
26	Maluku	Maluku Tenggara Barat	Kepulauan (Archipelago)
27	Maluku	Kepulauan Aru	Kepulauan (Archipelago)
28	Maluku Utara	Morotai	Kepulauan (Archipelago)
29	Papua	Supiori	Kepulauan (Archipelago)
30	Papua Barat	Raja Ampat	Kepulauan (Archipelago)
31	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Pesisir (Coastal)
32	Riau	Rokan Hilir	Pesisir (Coastal)
33	Riau	Dumai Kota	Pesisir (Coastal)
34	Riau	Bengkalis	Pesisir (Coastal)
35	Riau	Indragiri Hilir	Pesisir (Coastal)
36	Kalimantan Barat	Sambas	Pesisir (Coastal)
37	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Pesisir (Coastal)
38	Nusa Tenggara Timur	Timur Tengah Utara	Pesisir (Coastal)
39	Nusa Tenggara Timur	Belu	Pesisir (Coastal)
40	Nusa Tenggara Timur	Malaka	Pesisir (Coastal)
41	Papua	Jayapura	Pesisir (Coastal)

Sumber: BPS 42 Kabupaten/kota Perbatasan (dianalisis) (2022)

Sektor dan Komoditas Unggulan

Sektor dan komoditas unggulan terbagi atas 3 tipologi wilayah sebagai berikut.

Sektor dan komoditas unggulan wilayah perbatasan dengan tipologi daratan (*mainland*).

Wilayah perbatasan Indonesia dengan tipologi daratan mempunyai 6

sektor unggulan yaitu (1) pertanian, (2) perkebunan, (3) peternakan, (4) pertambangan, (5) pariwisata, dan (6) perikanan.

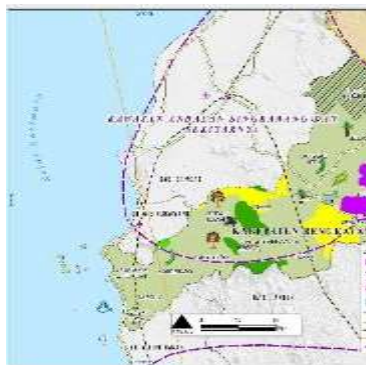
Komoditas yang paling unggul di wilayah perbatasan dengan tipologi daratan teridentifikasi 20 komoditas yaitu (1) jagung, (2) padi, (3) ubi kayu, (4) ubi jalar, (5) kedelai, (6) lada, (7) karet, (8) kelapa, (9) kopi, (10) kakao,

(11) kelapa sawit, (12) kaolin, (13) bauksit, (14) mangan, (15) andesit, (16) emas, (17) batubara, (18) tembaga, (19) wisata alam, dan (20) perikanan tangkap.

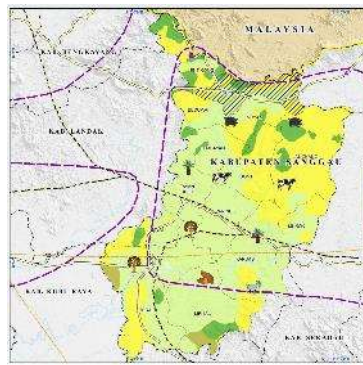
Tabel 3. Sektor dan Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia berdasarkan tipologi daratan

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Sektor Komoditas unggulan	Komoditas Potensi investasi
1	Riau	Pelalawan	pertanian, perkebunan, peternakan	jagung, kelapa sawit, sapi dan kambing
2	Kalimantan Barat	Bengkayang	perkebunan, perikanan, pertambangan	karet dan kelapa sawit, peternakan sapi, kambing, hingga babi, kaolin, bauksit, mangan, andesit, serta emas
3	Kalimantan Barat	Sanggau	pertanian, perkebunan	padi, kelapa sawit
4	Kalimantan Barat	Sintang	pertanian, perkebunan, pariwisata	ubi kayu, kelapa sawit, karet, lada, kelapa, kopi, serta kakao.
5	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	pertanian, perkebunan,	ubi kayu, ubi jalar, jagung, serta kedelai, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, lada, dan kopi
6	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	perkebunan, peternakan, pariwisata	kelapa sawit, sapi potong, ayam buras, ayam pedaging dan itik, wisata alam
7	Kalimantan Utara	Malinau	pertanian, perkebunan dan pertambangan	padi, kakao dan kopi, batubara
8	Kalimantan Utara	Nunukan	perikanan, perkebunan	perikanan tangkap dan kelapa sawit
9	Papua	Keerom	perkebunan, pertambangan	kelapa sawit dan kakao, emas dan tembaga
10	Papua	Pegunungan Bintang	perkebunan, pertambangan	kopi, emas
11	Papua	Boven Digoel	perkebunan	kelapa sawit, karet
12	Papua	Merauke	pertanian, perkebunan	padi, kelapa, karet

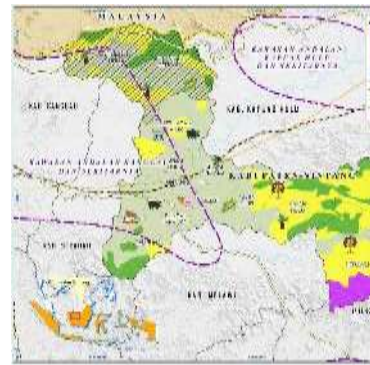
Sumber: BPS 42 Kabupaten/kota Perbatasan (dianalisis), 2022



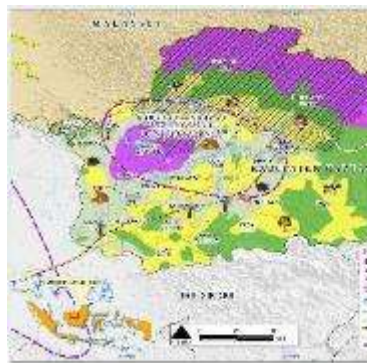
Bengkayang



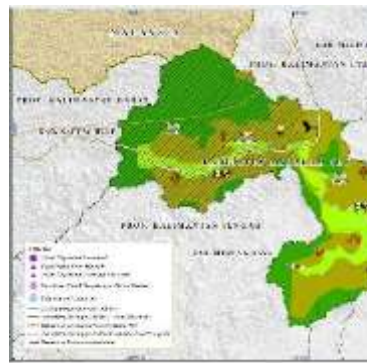
Sanggau



Sintang



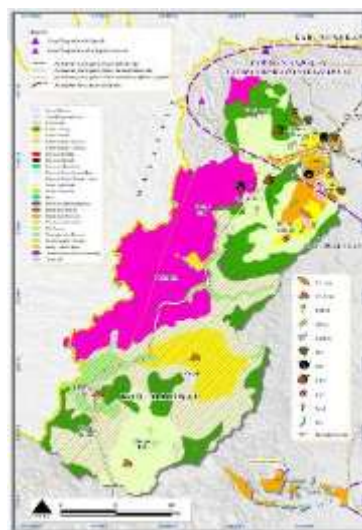
Kapuas Hulu



Mahakam Ulu



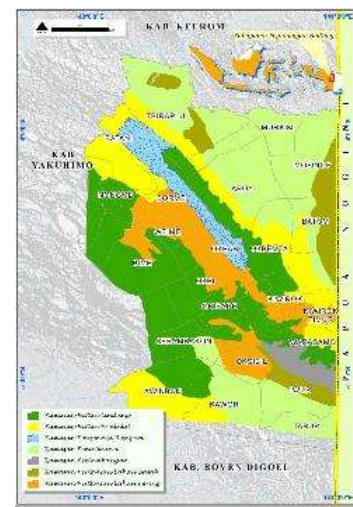
Nunukan



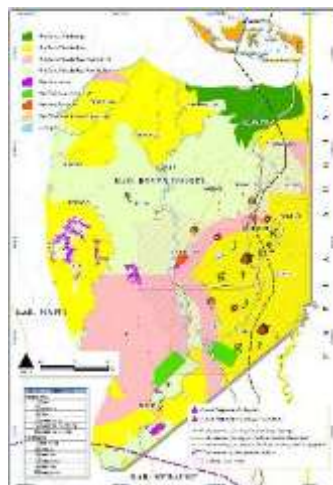
Malinau



Keerom



Pegunungan Bintang



Boven Digoel



Merauke

Sumber: Tim Penyusunan Identifikasi Potensi Investasi Perbatasan RI F. Geografi UGM (2017)

Gambar 2. Peta Sebaran Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Tipologi daratan

Sektor dan komoditas unggulan wilayah perbatasan dengan tipologi kepulauan (*archipelago*).

Sektor unggulan dengan tipologi wilayah perbatasan dengan karakteristik kepulauan tersebar di 6 provinsi yaitu (1) Aceh, (2) Riau, (3) Kepulauan Riau, (4) Nusa Tenggara Timur, (5) Sulawesi Utara, (6) Maluku, (7) Maluku Utara, (8) Papua dan (9) Papua Barat. Sedangkan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan ada 6 sektor yaitu (1) perkebunan, (2) pertanian, (3) perikanan, (4) pariwisata, (5) Jasa, dan (6) perikanan.

Pengembangan komoditas diarahkan kepada 34 komoditas

unggulan yaitu (1) kelapa, (2) kakao, (3) cengkeh, (4) ubi kayu, (5) kelapa sawit, (6) karet, (7) ikan, (8) rumput laut, (9) padi, (10) perumahan (11) hotel, (12) restoran, (13) biro wisata, (14) pisang, (15) nanas, (16) minyak dan gas bumi, (17) perikanan tangkap, (18) kopi, (19) kemiri, (20) jambu mete, (21) jagung, (22) ubi jalar, (23) lada, (24) bawang merah, (25) buah alpukat, (26) jambu biji, (27) lontar, (28) ikan pelagis, (29) ketela pohon, (30) babi, (31) sapi, (32) ikan tuna, (33) udang barong, (34) perikanan budidaya laut. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sektor dan Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia berdasarkan tipologi kepulauan

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Sektor Komoditas unggulan	Komoditas Potensi investasi
13	Aceh	Sabang	perkebunan dan perikanan	kelapa, kakao dan cengkih, serta perikanan tangkap
14	Riau	Kepulauan Meranti	pertanian dan perkebunan	ubi kayu, kelapa sawit dan karet
15	Kepulauan Riau	Karimun	Pertanian, perkebunan dan perikanan	padi, jagung, Kelapa, Karet, ikan dan rumput laut
16	Kepulauan Riau	Kota Batam	perikanan, pariwisata dan jasa	ikan, perumahan, perhotelan, restoran dan biro wisata
17	Kepulauan Riau	Bintan	pertanian, perkebunan, dan perikanan	pisang, ubi kayu, nanas, kelapa sawit, kelapa, karet dan perikanan tangkap
18	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	pariwisata dan sektor pertambangan	hotel, minyak dan gas bumi
19	Kepulauan Riau	Natuna	pertanian, perkebunan dan perikanan	padi, ubi kayu, jagung, ubi jalar, karet, cengkeh, kelapa, lada dan perikanan tangkap
20	Nusa Tenggara Timur	Alor	pertanian, perkebunan	kopi, kemiri, kelapa, jambu mete
21	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	tanaman pangan dan hortikultura	Padi, Jagung dan Ubi Kayu, Bawang Merah, Buah Alpukat dan Jambu Biji
22	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	perkebunan, perikanan	kelapa, lontar, dan jambu mete, rumput laut
23	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	perkebunan, perikanan	tanaman kelapa, pala dan cengkeh, perikanan laut tangkap, perikanan laut budidaya
24	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	perkebunan, perikanan	Tanaman kelapa, pala, dan cengkeh, perikanan laut
25	Maluku	Maluku Barat Daya	perikanan, tanaman pangan	ikan pelagis kecil, jagung dan ketela pohon

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Sektor Komoditas unggulan	Komoditas Potensi investasi
26	Maluku	Maluku Tenggara Barat	perikanan,	perikanan tangkap dan budidaya laut
27	Maluku	Kepulauan Aru	perkebunan, pertanian	Kakao dan Kelapa, Jagung dan Ubi Kayu
28	Maluku Utara	Morotai	perkebunan, pariwisata, perikanan	kakao, kelapa dan pala, hotel dan perikanan laut
29	Papua	Supiori	perkebunan, peternakan, perikanan	kelapa, sapi dan babi, ikan tuna, udang barong
30	Papua Barat	Raja Ampat	perikanan, pariwisata	perikanan tangkap dan budidaya laut

Sumber: BPS 42 Kabupaten/kota Perbatasan (dianalisis) (2022)



Sabang



Kota Batam



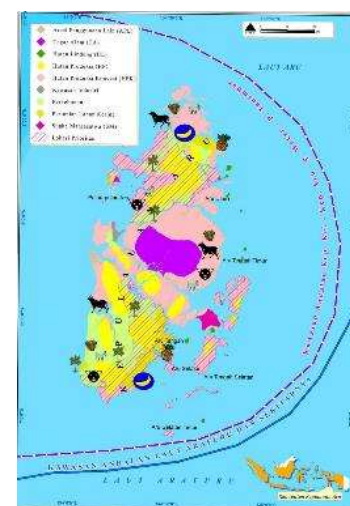
Kepulauan Sangihe



Kepulauan Talud



Maluku Tenggara Barat



Kepulauan Aru



Morotai



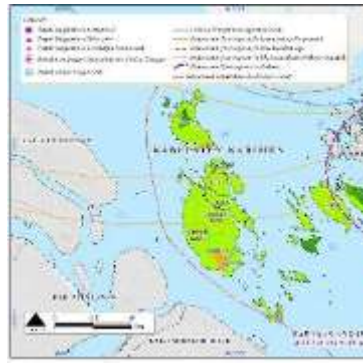
Supiori



Raja Ampat



Kepulauan Meranti



Karimun



Bintan



Kepulauan Anambas



Natuna



Alor



Sumber: Tim Penyusunan Identifikasi Potensi Investasi Perbatasan RI F. Geografi UGM, 2017

Gambar 3. Peta Sebaran Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Tipologi kepulauan

Sektor dan komoditas unggulan wilayah perbatasan dengan tipologi pesisir (coastal)

Sektor unggulan dengan tipologi wilayah perbatasan dengan karakteristik kepulauan tersebar di 5 provinsi yaitu (1) Sumatera Utara, (2) Riau, (3) Kalimantan Barat, (4) Nusa Tenggara Timur, dan (5) Papua.

Ada beberapa sector unggulan yang dapat menjadi acuan investasi di perbatasan dengan tipologi pesisir. Sektor tersebut adalah (1) perkebunan, (2) perikanan, (3) pertanian, (4)

pariwisata, (5) peternakan, (6) pertambangan.

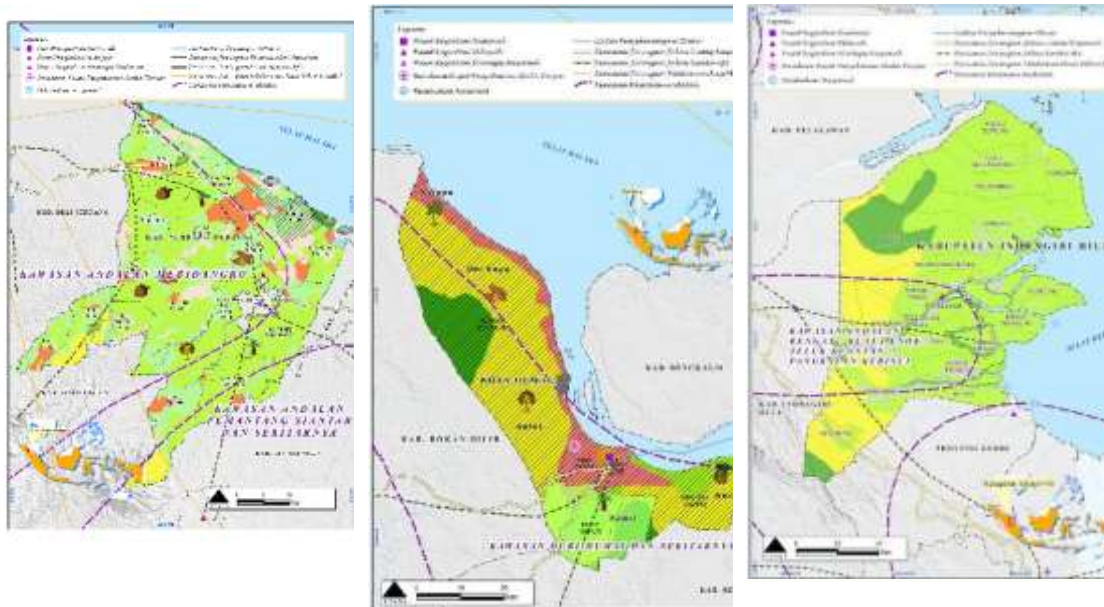
Sedangkan komoditas unggulan di wilayah perbatasan dengan tipologi pesisir teridentifikasi sebanyak 21 komoditas unggulan yang tersebar di 11 kabupaten/kota yaitu (1) ubi kayu, (2) kelapa sawit, (3) perikanan laut, (4) perikanan tangkap, (5) karet, (6) kelapa, (7) nanas, (8) wisata alam, (9) kambing, (10) jeruk silam, (11) padi, (12) jambu mete, (13) jagung, (14) kacang kedelai, (15) sapi, (16) babi, (17) kambing, (18) kuda, (19) kacang hijau, (20) emas, dan (21) batubara.

Tabel 5. Sektor dan Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia berdasarkan tipologi pesisir

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Sektor Komoditas unggulan	Komoditas Potensi investasi
31	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	perkebunan, perikanan	ubi kayu dan kelapa sawit, perikanan laut
32	Riau	Rokan Hilir	pertanian, perikanan	ubi kayu serta kelapa sawit, perikanan tangkap
33	Riau	Dumai Kota	perkebunan, pariwisata	karet, kelapa, nanas, serta kelapa sawit, wisata alam
34	Riau	Bengkalis	perkebunan, peternakan	kelapa sawit, kambing

35	Riau	Indragiri Hilir	pertanian, perkebunan	ubi kayu, kelapa sawit
36	Kalimantan Barat	Sambas	pertanian, perkebunan, pariwisata	ubi kayu dan jeruk silam, kelapa sawit, wisata alam
37	Nusa Tenggara Timur	Kupang	pertanian	padi, jambu mete
38	Nusa Tenggara Timur	Timur Tengah Utara	pertanian, perikanan, peternakan	Ubi kayu, Jagung lokal, dan Kacang kedelai, perikanan tangkap, ternak sapi, babi kambing, kuda
39	Nusa Tenggara Timur	Belu	pertanian, perikanan	padi, tangkapan laut
40	Nusa Tenggara Timur	Malaka	pertanian, pariwisata	padi jagung dan kacang hijau, wisata alam
41	Papua	Jayapura	pertambangan, perikanan	emas, batubara, perikanan tangkap

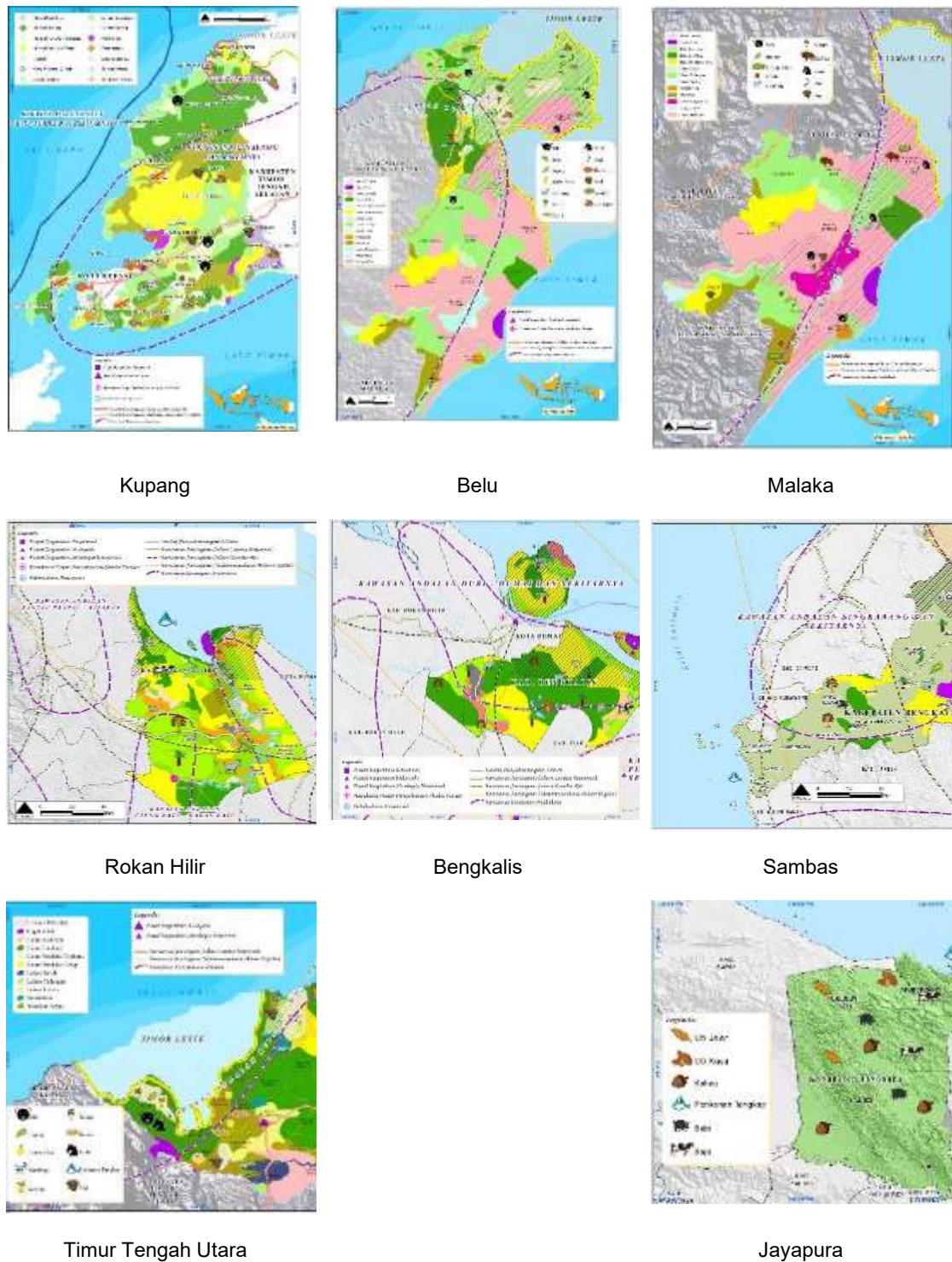
Sumber: BPS 42 Kabupaten/kota Perbatasan (dianalisis) (2022)



Serdang Bedagai

Dumai Kota

Indragiri Hilir



Sumber: Tim Penyusunan Identifikasi Potensi Investasi Perbatasan RI F. Geografi UGM (2017)
 Gambar 3. Peta Sebaran Komoditas Unggulan Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Tipologi pesisir

Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Beberapa hal utama yang menjadi pusat perhatian di kawasan perbatasan adalah tumbuhnya perhatian terhadap jejaring, mobilitas, globalisasi, dan demokratisasi secara global, yang berperan mewarnai alam kawasan perbatasan (Kurniadi, 2009). Dalam teori sosial, pendekatan batas sering digunakan dalam konteks gagasan jaringan yang terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu: mobilitas, gerak, kondisi yang berubah, dan karakteristik fisik menjadi komponen tersebut penting untuk memahami konteks wilayah perbatasan (Rumford, 2016).

Menurut klasifikasi Hagel tentang daerah terbelakang (*back-wash*), wilayah perbatasan termasuk daerah tertinggal secara komersial (Putri and Salim, 2019). Ke-42 wilayah perbatasan ini pada dasarnya dicirikan oleh sistem perkotaan dan pedesaan dengan kapasitas fungsional yang buruk dan peluang pengembangan, hilangnya energi demografis dan sosial, infrastruktur terutama jalan atau alat transportasi yang buruk, posisi perifer, dan orientasi komersial terhadap eksploitasi dasar alam yang tidak dievaluasi secara memadai.

Posisi geografis, potensi alam, dan kondisi budaya-etnis, yang tidak dievaluasi secara memadai mempengaruhi perspektif pembangunan jangka panjang. Hubungan etnis, budaya, ekonomi dan fungsional dengan daerah perbatasan di wilayah perbatasan Indonesia terlihat jelas. Kegiatan komersial pelengkap tertentu seperti pariwisata, dll.), konektivitas lalu lintas antar negara,

kebutuhan dan peluang meningkatkan kerjasama lintas batas Negara dalam melayani pengembangan wilayah perbatasan Indonesia.

Wilayah perbatasan Indonesia seperti Kabupaten Nunukan, Batam dapat diarahkan menjadi *Border Development Centre* (Ptak *et al.*, 2022) yang mampu mengembangkan kawasan perbatasan dan mendukung kawasan sekitarnya serta wilayah negara lain.

Pada akhirnya konsep ini dapat mendorong adanya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia di perbatasan sehingga selian dapat menjadi tumpuan ekonomi wilayah pinggiran (*periphery*), namun juga dapat menjadi wilayah keamanan negara (*National Security Region*).

Strategi pengembangan yang lain adalah menguatkan lokasi wisata alam terutama wilayah perbatasan dengan tipologi kepulauan yang kaya akan potensi laut seperti di Pulau Morotai serta dapat mengikut sertakan masyarakat dalam pengembangan pariwisata tersebut (Nugraha, 2020).

4. Penutup

Potensi investasi wilayah perbatasan Indonesia masih banyak didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan dan hasil hutan serta kekayaan sumberdaya alam. Sehingga pengembangan wilayah di perbatasan bergantung bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumberdaya alam yang dimiliki untuk percepatan pembangunan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada investor dalam merencanakan investasi yang tepat di wilayah perbatasan Indonesia.

Penelitian terkait perbatasan dalam paper ini masih terbatas kepada identifikasi potensi komoditas unggulan, perlu penelitian lebih lanjut terkait bagaimana sector unggulan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini terselenggara atas riset bersama antara Fakultas Geografi UGM dengan Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kemendesa dalam pembuatan buku Profil Investasi Perbatasan RI.

Daftar Pustaka

- Bakce, D., Syahza, A. and Asmit, B. (2019) 'Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan Antar-Negara di Provinsi Riau', in *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, pp. 182–189.
- Bria, M. E. and Suharno, S. (2018) 'Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Strategi Penguatan Nasionalisme Masyarakat Di Kawasan Perbatasan', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), pp. 81–88.
- Budianta, A. (2010) 'Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia', *SMARTek*, 8(1).
- Hasyim, A. W. and Subagiyo, A. (2017) *Pengelolaan wilayah perbatasan*. Universitas Brawijaya Press.
- Hidayati, I. (2020) Potensi Agribisnis Perikanan Darat di Daerah Karst Jawa Bagian Selatan, *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 170-182.
- Kurniadi, D. (2009) 'Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat'. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Kusumartono, F. X. H. et al. (no date) *Refleksi Membangun dari Pinggiran: Pembelajaran Dua Tahun Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Perbatasan*. Penerbit Andi.
- Laili, N. A. (2018) 'Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan (Studi Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia)'. Universitas Brawijaya.
- Marwasta, D. (2016) 'Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di indonesia: lesson learned dari kkn-ppm ugm di kawasan perbatasan', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), pp. 204–216.
- Mulyanto, S. S. (2017) 'Evaluasi Program Nusantarasehat Sebagai Bagian dari Prosperity Approach dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan', *Strategi Perang Semesta*, 3(3).
- Munaf, D. R. et al. (2008) 'Peran Teknologi Tepat Guna untuk Masyarakat Daerah Perbatasan Kasus Propinsi Kepulauan Riau', *Jurnal Sioteknologi*, 7(13), pp. 329–333.
- Muta'ali, L., Marwast, D. and Christanto, J. (2018) *Pengelolaan wilayah*

- perbatasan NKRI. UGM PRESS.
- Nasution, M. S. (2018) 'Potensi Wilayah Perbatasan Strategis', *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), pp. 117–124.
- Nugraha, Y. E. (2020) 'Analisis Potensi dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Tulakadi Kawasan Perbatasan Indonesia', *Media Wisata*, 18(2), pp. 195–209.
- Panutan, F. A. A., Fatimah, E. and Sugihartoyo, S. (2019) 'Upaya Pengembangan PKS N Jasa di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sintang', in *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan*.
- Ptak, T. *et al.* (2022) 'Understanding borders through dynamic processes: capturing relational motion from south-west China's radiation centre', *Territory, politics, governance*, 10(2), pp. 200–218.
- Purnamasari, W. *et al.* (2016) 'Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Indonesia Malaysia Di Sambas', *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), pp. 217–247.
- Pusparini, K., Wahyudi, B. and Widodo, P. (2020) 'Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia–Filipina (Studi Di Kabupaten Kepulauan Sangihe)', *Ekonomi Pertahanan*, 5(1).
- Putri, H. M. and Salim, W. (2019) 'Outer Island Development in Crossborder Cooperation Framework: Cooperation or Exploitation?(Study Case: Natuna Island in Singapore–Johor-Riau Cooperation)', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. IOP Publishing, p. 12040.
- Rani, F. (2012) 'Strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan menurut perspektif sosial pembangunan', *Transnasional*, 4(01).
- Retnowati, R. *et al.* (2019) 'Government Primary School Services In Indonesia-Malaysia's Border Area of Entikong', in *Iapa Proceedings Conference*, pp. 118–123.
- Rumford, C. (2016) 'Towards a Multiperspectival Study of Borders', in *Critical Border Studies*. Routledge, pp. 169–184.
- Ruyani, N. R. (2017) 'Alternatif program perencanaan sosial ke-pu-an di perbatasan Indonesia Malaysia fokus di kawasan kalimantan timur', *Jurnal Administrator*, 5(1), pp. 63–91.
- Sholihah, I. (2016) 'Kebijakan hukum pembangunan kawasan perbatasan melalui infrastruktur berbasis teknologi', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), pp. 305–321.
- Siregar, C. N., Sutiadi, R. and Epin, S. (2019) 'Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia: Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia)', *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1).
- Sudiar, S. (2017) 'Pembangunan wilayah perbatasan negara: gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan

- Utara', *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 3(4), pp. 489–500.
- Sudiar, S. (2019) 'Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), pp. 152–160.
- Suryana, I G. P. E. & Wijayanti, N. W. E. (2020) Potensi Batu Kapur Bukit Pecatu sebagai Instrumen Pemanen dan Penampung Air Hujan, *Media Komunikasi Geografi*, 21(1), 74-83.
- Syamwil, I. B. & Oetomo, A. (2005) 'Pembangunan Wilayah di Perbatasan Negara Kasus Kalimantan Barat'.